BAB II

LINGKUP ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Perusahaan Telekomunikasi PT. Industri Telekomunikasi Indonesia

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) resmi berdiri melalui Peraturan Pemerintah, PP No. 34 tahun 1974, sejak tanggal 30 Desember 1974 dengan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia No. Kep. 1/11/MK/IV/12/1974 merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perseroan dan negara melalui Departemen Keuangan sebagai pemilik saham. Dalam pengelolaannya PT. INTI (Persero) berada di lingkungan Departemen Teknis Deparpostel, dibawah Dirjen Postel melalui PP No. 59 tahun 1983 PT. INTI (Persero) dimasukan kekelompok Industri strategis.

Sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang industri khususnya sektor telekomunikasi dan elektronika profesional, PT. INTI (Persero) mengemban misi tertentu yang dirumuskan sebagai berikut:

"Menjadi basis data tulang punggung dari kemampuan nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang telekomunikasi dan elektronika profesional baik piranti lunak maupun piranti keras dalam rangka menunjang wawasan nusantara dan ketahanan nasional".

Selanjutnya misi ini dijalankan menjadi tujuan objektif sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan nasional dalam bidang telekomunikasi dan elektronika profesional baik piranti lunak maupun piranti keras.
2. Menjadi penunjang utama pengembangan sistem telekomunikasi nasional
3. Menjadi pendorong pengembangan industri nasional, khususnya industri pendukung dalam bidang telekomunikasi dan elektronika nasional.
4. Peningkatan kemampuan untuk tumbuh dengan kekuatan sendiri dalam dunia usaha.
5. Menjadi sumber devisa bagi negara.

Sejak berdirinya PT. INTI (Persero) berkedudukan di kompleks laboratorium PTT di jalan Mohammad Toha No.77 Bandung serta di jalan Mohammad Toha No.255 Bandung.

Keberadaan perusahaan ini dimulai dengan didirikannya laboratorium Pos, Telepon dan Telegraf (PTT), pada tahun 1926 di jalan Mohammad Toha No.77 Bandung. Kemudian dilokasi yang sama pada tahun 1929 didirikan pula laboratorium Radio serta pusat perlengkapan Radio. Dalam perlengkapan selanjutnya, laboratorium ini menjadi bagian yang sangat penting bagi penelitian dan perkembangan telekomunikasi di Indonesia.

Setelah Perang Dunia II berakhir, laboratorium PTT di jalan Mohammad Toha No. 77 ini ditingkatkan kedudukannya menjadi laboratorium telekomunikasi, yang mencakup seluruh bidang telekomunikasi, yaitu Telepon, Telegraf, Radio dan sebagainya. Sedangkan berdirinya pusat bengkel Radio ditingkatkan menjadi Bengkel Pusat Telekomunikasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 240 tahun 1961, jawatan Pos, Telepon, dan Telegraf diubah status hukumnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Didalam struktur organisasi PN Postel antara lain dicantumkan bahwa bagian penelitian berada di bawah Direktorat Riset dan Perencanaan. Sementara bagian perbengkelan dan kendaraan bermotor berada di bawah Direktorat Perlengkapan Kantor.

Kemudian dengan PP No. 300 tahun 1965 didirikan PN Telekomunikasi yang berasal dari PN Postel, sebagai realisasi dan kebijakan ini bagian penelitian dan perlengkapan yang sebelumnya terpisah dalam struktur PN Postel digabungkan dan diganti nama menjadi Lembaga Administrasi Bagian Penelitian dan Bagian Produksi.

Pada tanggal 25 Mei 1966 dilakukan perjanjian kerja sama antara PN Telekomunikasi dan Siemens, yang pelaksanaannya dibebankan kepada lembaga pendidikan dan pengembangan Pos dan Telekomunikasi (LPP). Untuk merealisasikan kerja sama tersebut, maka pada tanggal 17 Februari 1968, dibentuk bagian Pabrik Telepon dalam organisasi LPP Postel. Dengan adanya unsur industri, maka LPP Postel diubah menjadi lembaga penelitian dan pengembangan industri Pos dan Telekomunikasi yang di singkat menjadi LPPI Postel.

Pada tanggal 22 Juni 1968, industri telekomunikasi yang berpangkal pada pabrik telepon diresmikan pembukaannya oleh Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Ekuin, Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Dengan lahirnya proyek industri telekomunikasi pada tanggal 1 sampai 30 oktober 1970 di Jakarta diadakan rapat kerja sama dan telekomunikasi. Dari rapat kerja sama tersebut dihasilkan keputusan bahwa kepada LPPI Postel diberikan waktu kurang lebih 4 tahun untuk mempersiapkan diri agar dapat berdiri sendiri dalam bidang keuangan, kepegawaian dan peralatan.

Selanjutnya pada tahun 1971, diadakan pemisahan dalam organisasi-organisasi LPPI Postel, yaitu:

1. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Postel dengan tugas pokok dalam bidang pengujian, penelitian dan pengembangan sarana Pos dan Telekomunikasi, baik dalam organisasi maupun operasionalnya.
2. Lembaga Industri (Produksi) sebagai Badan Hukum yang berdiri sendiri, dengan tugas pokok memproduksi sarana-sarana atau alat-alat telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan nasional.

Tujuan Berdirinya PT INTI

PT. INTI mengemban suatu misi tertentu yaitu menjadi bisnis tulang punggung dari kemampuan nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang telekomunikasi dan elektronika professional baik piranti lunak *(software)* maupun piranti keras *(hardware)* dalam rangka menunjang wawasan nusantara yang sehat dan dinamis.

Selanjutnya misi ini di jabarkan melalui tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan nasional dalam bidang telekomunikasi dan elektronika, baik piranti lunak maupun piranti keras.

2. Menjadi penunjang utama pengembangan sistem telekomunikasi nasional.
3. Menjadi pendorong perkembangan industri nasional khususnya industri pendukung dalam bidang telekominikasi dan elektronika professional.
4. Peningkatan kemampuan untuk tumbuh dalam kekuatan sendiri dan dunia usaha.
5. Menjadi sumber penghasilan devisa.

Kegiatan PT INTI

Kegiatan utama meliputi seluruh tata kerja PT INTI yaitu:

1. Sistim Engineering
2. Perancangan
3. Pabrikasi
4. Perakitan
5. Instalasi
6. Pelayanan purna jual.

Sedangkan produk-produk yang dihasilkan PT INTI adalah:

1) Digital Switching dan Telepon
    a. Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI)
    b. Sentral Langganan Otomatis (STO)
    c. Pesawat Telepon
    d. Telepon umum
2) Radio dan Transmisi
    a. Stasiun Bumi Kecil
    b. Sambungan Telepon Kendaraan Bermotor
    c. Transeiver HF-SJB

d. Multiplex PCM Transmisi

e. Digital Microwave Radio

f. Radio Sonde dan Wind Radio

g. Pesawat Telepon Umum Swalayan

h. Packsanet

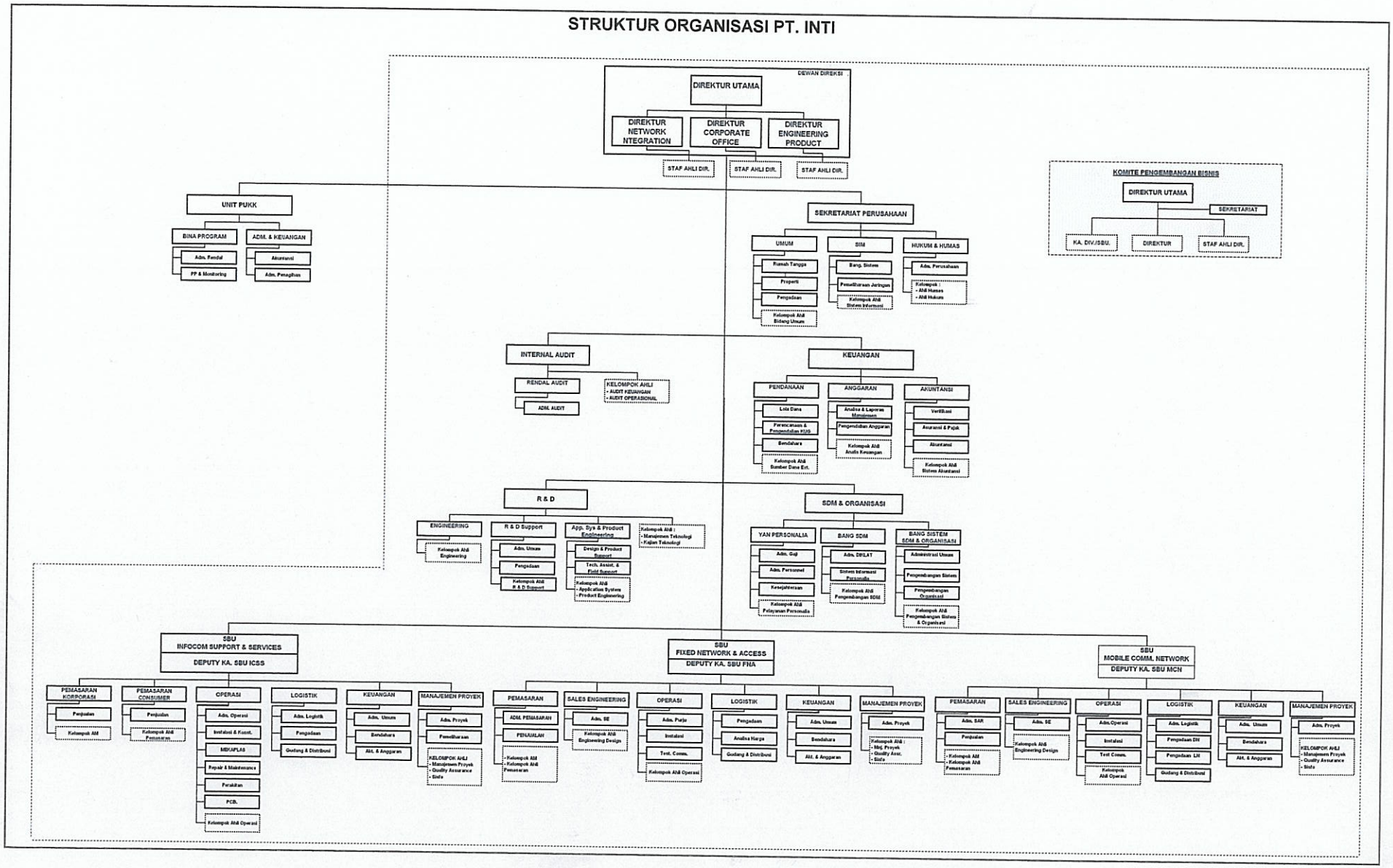
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.2 Struktur Organisasi

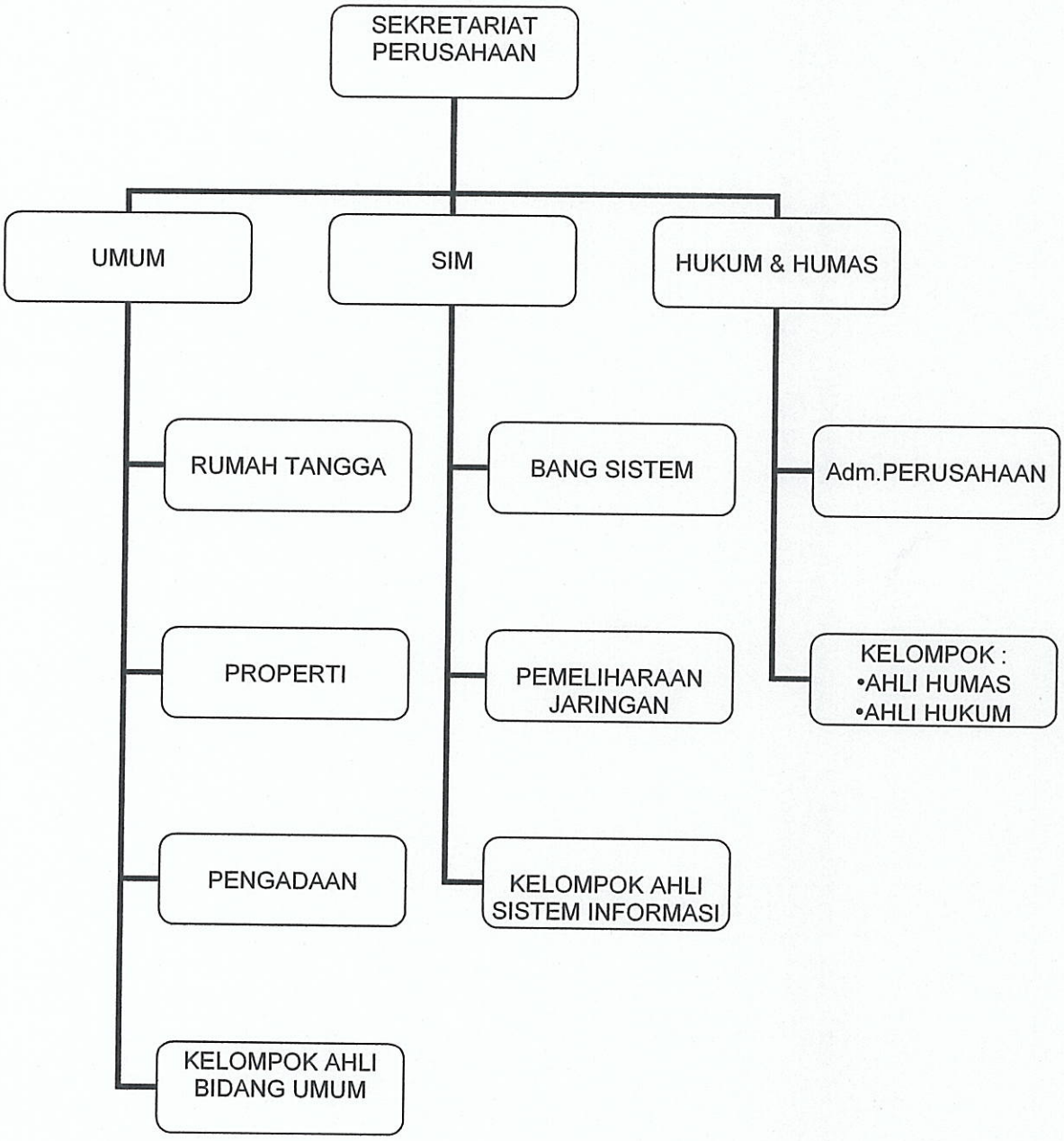
PT.Industri Telekomunikasi Indonesia sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang industri khususnya sektor telekomunikasi dan elektronika professional memiliki tata kerja kelompok yang berorientasi pada kepentingan negara.Hal tersebut yang membuat PT.Industri Telekomunikasi Indonesia memerlukan sebuah struktur organisasi dalam menjalankan perusahaannya menjadikan PT.INTI (Persero) menjadi perusahaan yang terstruktur dengan baik.

Adapun struktur organisasi PT.INTI (Persero) adalah :

STRUKTUR ORGANISASI PT. INTI



Struktur Organisasi Tempat Penulis Melakukan Kerja Praktek



Fungsi dan Tugas Pokok Dewan Direksi

PT INTI (Persero) merupakan suatu kerangka yang menunjukan suatu pola hubungan tetapi antara kedudukan peranan dari pembagian tugas ke arah spesialisasi masing-masing yag dimiliki tenaga kerja.

Suatu perusahaan membutuhkan bagan struktur organisasi agar pimpinan dapat memperlihatkan pembagian tugas dengan jelas dan secara terperinci bagi setiap bagian dan diharapkan suatu kerjasama yang baik antara personil dalam mengelola dan mengembangkan pemecahan agar tercapai tujuan dari perusahaan yang telah ditetapkan.

PT INTI (Persero) dipimpin oleh seorang direksi utama, yang tugas pokoknya adalah memimpin seluruh kegiatan pengelolaan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar & keputusan rapat umum pemegang saham.

Direktur utama dalam hal ini mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan kegiatan direksi dalam menjalankan kebijaksanaan strategis perusahaan sesuai dengan tugas direksi agar misi perusahaan berjalan dengan baik.
2) Membina anggota direksi yang lain sebagai suatu keterkaitan fungsional serta dengan semangat yang kuat untuk memimpin unit-unit bawahan yang berada dibawah direktorat masing-masing agar terbentuk integrasi antar direktorat.

Adapun fungsi dan tugas pokok dari masing-masing dewan direksi adalah sebagai berikut :

1. Direktur Pemasaran

Fungsi :

Merencanakan, merumuskan dan mengendalikan kebijakan umum pemasaran yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan strategi pemasaran SBU.

Tugas pokok :

1) Merumuskan sasaran, kebijakan dan strategi pemasaran serta rencana kerja perusahaan tahunan, yang mencakup pengembangan pasar dari produk jual yang ada, yaitu :
   a. Pengembangan pasar baru dari produk baru.
   b. Strategi harga jual yang efektif.
   c. Kegiatan promosi pemasaran yang efektif dan efisien.
   d. Sistem riset pasar yang efektif.
   e. Kemampuan menjual pasar yang baik
2) Membina SBU, khususnya aspek pemasaran.
3) Mengawasi operasional SBU, pemasaran sentral, SBU Terminal dan SBU Transmisi.
4) Menilai hasil kerja setiap unit dan menetapkan tindak lanjutnya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
5) Membina dan dibantu oleh semua staf senior pemasaran.

2. Direktur Produksi

Fungsi :

Merencanakan, merumuskan dan mengendalikan kebijakan umum produksi yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penyusunan strategi SBU.

Tugas pokok :

1) Merumuskan sasaran, kebijakan dan strategi produksi untuk pengembangan perusahaan dan rencana kerja perusahaan tahunan, yang mencakup :



   a. Kemampuan produksi untuk memenuhi permintaan pasar.
   b. Fasilitas peralatan dan permesinan yang efektif dan efisien
   c. Pengelolaan sistem pengadaan bahan baku dan sub prakiraan yang efektif dan efisien.
   d. Pengelolaan biaya operasional yang efisien dan bersaing.
   e. Peningkatan produksi *multi sourcing* dan menjual yang efektif.

2) Membina SBU, khususnya aspek produksi.
3) Mengawasi operasional SBU produksi sentral, SBU pelayanan sentral dan proyek prapabrikasi.
4) Menilai hasil kerja setiap unit sebagai mana dimaksudkan dalam butir (b) diatas serta menetapkan tindak lanjut pembinaan yang diperlukan untuk menentukan masalah-masalah yang dihadapinya.

3. Direktur Teknologi

Fungsi :

Merencanakan, merumuskan dan mengendalikan kebijakan umum dibidang penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi.

Tugas pokok :

1) Merumuskan sasaran, kebijakan, dan strategi teknologi untuk pengembangan perusahaan dan rencana kerja perusahaan tahunan meliputi :

a. Peramalan teknologi yang efektif yang akan diterapkan peningkatan kemampuan pengembangan yang sudah ada.

b. Peningkatan kemampuan pengembangan produk baru berorientasi pasar.

2) Membina SBU, khususnya aspek teknologi, mengarahkan divisi penelitian dan pengembangan dan proyek rekayasa sistem serta proyek-proyek pengembangan usaha lainya.

3) Menilai hasil kerja setiap unit sebagai mana dimaksud oleh butir (b) diatas, serta menetapkan tindak lanjut pembinaan yang di perlukan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

4. Direktur Admimistrasi dan Keuangan

Fungsi :

Merencanakan, merumuskan, dan mengendalikan kebijakan umum dibidang keuangan, akuntansi, SDM dan organisasi.

Tugas pokok :

1) Merumuskan sasaran, kebijakan dan strategi keuangan dan sumber daya manusia untuk pengembangan perusahaan dan merencanakan rencana kerja perusahan tahunan, yang mencakup :

a. Struktur modal efektif.

b. Pengelolaan modal efektif.

c. Perencanaan keuangan, modal kerja dan prosedur.

d. Penganggaran modal kerja yang efektif dan efisien.

e. Sistem akuntansi untuk perancangan dan pertanggung jawaban keuangan perusahaan.

f. Pengembangan pengolahan sumber daya manusia dan organisasi.

2) Membina SBU, khususnya aspek keuangan, sistem akuntansi serta pembinaan SDM.

3) Mengarahkan dan mengawasi operasional divisi keuangan serta divisi SDM dan Organisasi.